



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR 46 TAHUN 2024
TENTANG
DAFTAR DATA DAN DATA PRIORITAS
KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, terkait daftar data yang dikumpulkan oleh Produsen Data dan yang akan dibutuhkan oleh pengguna data;
- b. bahwa hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Daftar Data Prioritas Kabupaten Natuna berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan Kementerian PPN/Bappenas Nomor 8/JUKLAK/SESMEN/12/2022 tentang Penyusunan Data Prioritas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Data dan Data Prioritas Kabupaten Natuna;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Petunjuk Pelaksanaan Kementerian PPN/Bappenas Nomor 8/JUKLAK/SESMEN/12/2022 tentang Penyusunan Data Prioritas;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 46);

14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 27);
15. Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 302);

Memperhatikan : Berita Acara Kesepakatan Forum Satu Data Tingkat Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor: 000.9.6/BP3D-SDI/BA/2023 mengenai Penyepakatan Data Prioritas 2023 dan Rencana Aksi Satu Data Indonesia (SDI) 2022-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Data dan Data Prioritas Kabupaten Natuna dengan rincian sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Daftar Data dan Data Prioritas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan dalam mendukung Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kabupaten Natuna.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 15 Januari 2024

BUPATI NATUNA,


WAN SISWANDI

Tembusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. Prov. Kepri di Tanjungpinang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Natuna di Ranai;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna di Ranai;
4. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna di Ranai;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna di Ranai;
6. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna di Ranai; dan
7. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR 46 TAHUN 2024
TENTANG DAFTAR DATA DAN DATA
PRIORITAS KABUPATEN NATUNA

DAFTAR DATA DAN DATA PRIORITAS KABUPATEN NATUNA

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
1.	Angka Kelulusan SD/MI	Disdikbud	Tahunan	Februari	-	-	-	-
2.	Angka Kelulusan SMP/MTS	Disdikbud	Tahunan	Februari	-	-	-	-
3.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Disdikbud	Tahunan	Februari	-	-	4.2.2.(a)	-
4.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat	Disdikbud	Tahunan	Februari	-	-	4.1.1.(d)	-
5.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat	Disdikbud	Tahunan	Februari	-	-	4.1.1.(e)	-
6.	Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik (TK, SD, SMP)	Disdikbud	Tahunan	Februari	-	-	4.c.1	-
7.	Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik TK	Disdikbud	Tahunan	Februari	-	-	4.c.1	-
8.	Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik SD	Disdikbud	Tahunan	Februari	-	-	4.c.1	-
9.	Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik SMP	Disdikbud	Tahunan	Februari	-	-	4.c.1	-
10.	Persentase PAUD Berakreditasi Minimal B	Disdikbud	Tahunan	Februari	-	-	-	-
11.	Persentase SD/MI Berakreditasi Minimal B	Disdikbud	Tahunan	Februari	-	-	4.1.1.(a)	-
12.	Persentase Siswa dengan Nilai Kemampuan Literasi Pendidikan SD	Disdikbud	Tahunan	Februari	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
13.	Persentase Siswa dengan Nilai Kemampuan Literasi Pendidikan SMP	Disdikbud	Tahunan	Februari	-	-	-	-
14.	Persentase SMP/MTs Berakreditasi Minimal B	Disdikbud	Tahunan	Februari	-	-	4.1.1.(b)	-
15.	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Disdikbud	Tahunan	Februari	-	-	-	-
16.	Persentase Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	Disdikbud	Tahunan	Februari	-	-	-	-
17.	Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Disdikbud	Tahunan	Februari	-	-	-	-
18.	Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Disdikbud	Tahunan	Februari	-	-	-	-
19.	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Disdikbud	Tahunan	Februari	-	-	-	-
20.	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun dalam Pendidikan Usia Dini	Disdikbud	Tahunan	Februari	-	-	-	-
21.	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	Disdikbud	Tahunan	Februari	-	-	-	-
22.	Fasilitas Sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya	Disdikbud	Tahunan	Februari	-	-	-	-
23.	Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan (Penyebarluasan, Pengkajian dan Penayaan Keberagaman)	Disdikbud	Tahunan	Februari	-	-	-	-
24.	Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi (Inventarisasi, Pengamanan Pemeliharaan dan Penyelamatan dan Publikasi)	Disdikbud	Tahunan	Februari	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESASAK
25.	Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dimanfaatkan (Membangun Karakter Bangsa, Meningkatkan Ketahanan Budaya dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat)	Disdikbud	Tahunan	Februari	-	-	-	-
26.	Jumlah SDM, Lembaga dan Pranata yang Dibina (Peningkatan Kompetensi, Standarisasi dan Sertifikasi, serta Peningkatan KapasitasTata Kelola)	Disdikbud	Tahunan	Februari	-	-	-	-
27.	Pembentukan Tim Pendaftaran Cagar Budaya	Disdikbud	Tahunan	Februari	-	-	-	-
28.	Pengelolaan, Pengamanan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Museum	Disdikbud	Tahunan	Februari	-	-	-	-
29.	Peningkatan Akses Masyarakat dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana Museum Kabupaten/Kota	Disdikbud	Tahunan	Februari	-	-	-	-
30.	Peningkatan Akses Masyarakat dalam Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Kegiatan	Disdikbud	Tahunan	Februari	-	-	-	-
31.	Peningkatan Kompetensi SDM Cagar Budaya dan Pemuseuman Kabupaten/Kota	Disdikbud	Tahunan	Februari	-	-	-	-
32.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendaftaran Cagar Budaya dan Permuseuman	Disdikbud	Tahunan	Februari	-	-	-	-
33.	Penyelenggaraan Kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Disdikbud	Tahunan	Februari	-	-	-	-
34.	Register Cagar Budaya (Pendaftaran, Pengkajian, Penetapan, Pencatatan, Peningkatan dan Penghapusan)	Disdikbud	Tahunan	Februari	-	-	-	-
35.	Terlestarikannya Cagar Budaya	Disdikbud	Tahunan	Februari	-	-	-	-
36.	Persentase Aktualisasi Budaya Daerah	Disdikbud	Tahunan	Februari	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
37.	Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1/DIV	Disdikbud	Tahunan	Februari	-	-	-	-
38.	Iklim Keamanan Sekolah SD	Disdikbud	Tahunan	Februari	-	-	-	-
39.	Iklim Keamanan Sekolah SMP	Disdikbud	Tahunan	Februari	-	-	-	-
40.	Iklim Kebhinekaan Sekolah SD	Disdikbud	Tahunan	Februari	-	-	-	-
41.	Iklim Kebhinekaan Sekolah SMP	Disdikbud	Tahunan	Februari	-	-	-	-
42.	Iklim Inklusivitas SD	Disdikbud	Tahunan	Februari	-	-	-	-
43.	Iklim Inklusivitas SMP	Disdikbud	Tahunan	Februari	-	-	-	-
44.	Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna	Disdikbud	Tahunan	Februari	-	-	-	-
45.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Pendidikan Terakhir Disdikbud	Disdikbud	Tahunan	Februari	-	-	-	-
46.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan Disdikbud	Disdikbud	Tahunan	Februari	-	-	-	-
47.	Jumlah Siswa Negeri dan Swasta Taman Kanak (TK)/Raudhatul Athfal (RA), Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA) dan Satuan Paud Sejenis (SPS)	Disdikbud	Tahunan	Februari	-	-	-	-
48.	Jumlah Guru Mengajar Taman Kanak (TK)/Raudhatul Athfal (RA), Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA) dan Satuan Paud Sejenis (SPS)	Disdikbud	Tahunan	Februari	-	-	-	-
49.	Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta Taman Kanak (TK)/Raudhatul Athfal (RA), Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA) dan Satuan Paud Sejenis (SPS)	Disdikbud	Tahunan	Februari	-	-	-	-
50.	Jumlah Siswa Negeri dan Swasta Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)	Disdikbud	Tahunan	Februari	-	-	-	-
51.	Jumlah Guru Mengajar Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)	Disdikbud	Tahunan	Februari	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
52.	Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)	Disdikbud	Tahunan	Februari	-	-	-	-
53.	Jumlah Siswa Negeri dan Swasta Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)	Disdikbud	Tahunan	Februari	-	-	-	-
54.	Jumlah Guru Mengajar Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)	Disdikbud	Tahunan	Februari	-	-	-	-
55.	Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)	Disdikbud	Tahunan	Februari	-	-	-	-
56.	Angka Kematian Bayi	Dinkes	Tahunan	Maret	-	-	3.2.2.(a)	-
57.	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Dinkes	Tahunan	Maret	-	-	3.1.1.	-
58.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	Dinkes	Tahunan	Maret	-	-	-	-
59.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinkes	Tahunan	Maret	-	-	-	-
60.	Persentase Balita Gizi Buruk	Dinkes	Tahunan	Maret	-	-	-	-
61.	Persentase balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Dinkes	Tahunan	Maret	-	-	-	-
62.	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinkes	Tahunan	Maret	-	-	-	-
63.	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	Dinkes	Tahunan	Maret	-	-	-	-
64.	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan sesuai standar	Dinkes	Tahunan	Maret	-	-	-	-
65.	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinkes	Tahunan	Maret	-	-	-	-
66.	Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Dinkes	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
67.	Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai Standar	Dinkes	Tahunan	Maret	-	-	-	-
68.	Persentase Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV sesuai Standar	Dinkes	Tahunan	Maret	-	-	-	-
69.	Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC sesuai Standar	Dinkes	Tahunan	Maret	-	-	-	-
70.	Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar	Dinkes	Tahunan	Maret	-	-	-	-
71.	Persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Dinkes	Tahunan	Maret	-	-	-	-
72.	Persentase penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinkes	Tahunan	Maret	-	-	-	-
73.	Persentase Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	Dinkes	Tahunan	Maret	-	-	-	-
74.	Persentase Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinkes	Tahunan	Maret	-	-	-	-
75.	Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinkes	Tahunan	Maret	-	-	-	-
76.	Persentase penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinkes	Tahunan	Maret	-	-	-	-
77.	Persentase Prevalensi Stunting	Dinkes	Tahunan	Maret	-	-	2.2.1	-
78.	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	Dinkes	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
79.	Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Dinkes	Tahunan	Maret	-	-	-	-
80.	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar	Dinkes	Tahunan	Maret	-	-	-	-
81.	Persentase warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Dinkes	Tahunan	Maret	-	-	-	-
82.	Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Dinkes	Tahunan	Maret	-	-	-	-
83.	Angka Kematian Bayi	Dinkes	Tahunan	Maret	-	-	-	-
84.	Indeks Kesehatan	Dinkes	Tahunan	Maret	-	-	-	-
85.	Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan	Dinkes	Tahunan	Maret	-	-	-	-
86.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Pendidikan Terakhir	Dinkes	Tahunan	Maret	-	-	-	-
87.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan	Dinkes	Tahunan	Maret	-	-	-	-
88.	Jumlah Persalinan Bayi	Dinkes	Tahunan	Maret	-	-	-	-
89.	Jumlah Balita Stunting	Dinkes	Tahunan	Maret	-	-	-	-
90.	Jumlah Penderita Penyakit Menular	Dinkes	Tahunan	Maret	-	-	-	-
91.	Jumlah Kasus HIV Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur	Dinkes	Tahunan	Maret	-	-	-	-
92.	Jumlah Fasilitas Kesehatan	Dinkes	Tahunan	Maret	-	-	-	-
93.	Kinerja Penyediaan Pelayanan SPALD T Akses Aman	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
94.	Kinerja Penyediaan Sambungan Rumah yang Tersambung ke IPALD	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
95.	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
96.	Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kabupaten/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
97.	Jumlah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kualitas Pengelolaan Lumpur Tinja Perkotaan dan Dilakukan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	6.3.1.(a)	-
98.	Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lain	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
99.	Jumlah Penerima Manfaat Air Limbah	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
100.	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
101.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
102.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
103.	Kinerja Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
104.	Kinerja Penyediaan Pelayanan SPALD S Akses Aman	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
105.	Kinerja Penyediaan Pelayanan SPALD S Akses Dasar	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
106.	Kinerja Penyediaan Prasarana Pengolahan Lumpur Tinja	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
107.	Kinerja Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
108.	Kinerja Penyediaan Unit Pengolahan Setempat	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
109.	Panjang Jalan Berdasarkan yang Ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
110.	Panjang Jalan yang Dibangun	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
111.	Panjang Jembatan yang Dibangun	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
112.	Penetapan Dokumen RISPAM Kabupaten/Kota (Ada/Tidak)	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
113.	Persentase Bangunan Gedung sesuai dengan Peruntukan Ruang	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
114.	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
115.	Persentase Kemantapan Jalan	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
116.	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Primer Kondisi Baik	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
117.	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Sekunder dalam Kondisi Baik	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
118.	Persentase Penduduk Berakses Air Bersih	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
119.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	6.2.1.(b)	-
120.	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
121.	Proporsi Populasi yang Memiliki Akses Layanan Sumber Air Minum Aman dan Berkelanjutan	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	6.1.1.(c)	-
122.	Proporsi Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	6.2.1	-
123.	Proporsi Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	6.3.1.(b)	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
124.	Rasio Bangunan Gedung (Kecuali Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret Sederhana) yang Layak Fungsi	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
125.	Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten/Kota	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
126.	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
127.	Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis Kabupaten	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
128.	Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
129.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
130.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
131.	Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Kecamatan	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
132.	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
133.	Data Panjang dan Status Jalan	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
134.	Data Saluran Irigasi	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
135.	Panjang Jembatan	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
136.	Panjang Jembatan Menurut Kondisi	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
137.	Data Panjang dan Jenis Permukaan Jalan Menurut Status	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
138.	Data Kondisi Permukaan Jalan Nasional dan Provinsi	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
139.	Berkurangnya Jumlah RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Dinas Perkim	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
140.	Jumlah kawasan Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Dinas Perkim	Tahunan	Maret	-	-	-	-
141.	Jumlah kawasan Perumahan yang Terfasilitasi PSU	Dinas Perkim	Tahunan	Maret	-	-	-	-
142.	Jumlah Rumah Pembangunan Baru/Peningkatan Kualitas	Dinas Perkim	Tahunan	Maret	-	-	-	-
143.	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Dinas Perkim	Tahunan	Maret	-	-	-	-
144.	Kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dinas Perkim	Tahunan	Maret	-	-	-	-
145.	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang Ditangani	Dinas Perkim	Tahunan	Maret	-	-	-	-
146.	Persentase Meningkatnya Rumah Layak Huni	Dinas Perkim	Tahunan	Maret	-	-	-	-
147.	Rasio Rumah dan KK	Dinas Perkim	Tahunan	Maret	-	-	-	-
148.	Dokumen Izin Membuka Tanah	Dinas Perkim	Tahunan	Maret	-	-	-	-
149.	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Dinas Perkim	Tahunan	Maret	-	-	-	-
150.	Persentase Inventarisasi Tanah Kosong di Kabupaten	Dinas Perkim	Tahunan	Maret	-	-	-	-
151.	Tersedianya Tanah untuk Masyarakat	Dinas Perkim	Tahunan	Maret	-	-	-	-
152.	Data Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	D L H	Tahunan	Maret	-	-	-	-
153.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	D L H	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
154.	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	D L H	Tahunan	Maret	-	-	-	-
155.	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau Kegiatan izin Lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	D L H	Tahunan	Maret	-	-	-	-
156.	Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUULH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota yang Ditangani	D L H	Tahunan	Maret	-	-	-	-
157.	Peningkatan Ruang Terbuka Hijau	D L H	Tahunan	Maret	-	-	-	-
158.	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani	D L H	Tahunan	Maret	-	-	11.6.1.(a)	-
159.	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	D L H	Tahunan	Maret	-	-	-	-
160.	Tersedianya Data dan Informasi Penanganan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	D L H	Tahunan	Maret	-	-	-	-
161.	Indeks Kualitas Air	D L H	Tahunan	Maret	-	-	-	-
162.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	D L H	Tahunan	Maret	-	-	-	-
163.	Indeks Kualitas Udara	D L H	Tahunan	Maret	-	-	-	-
164.	Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna	D L H	Tahunan	Maret	-	-	-	-
165.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna	D L H	Tahunan	Maret	-	-	-	-
166.	Volume Penanganan Sampah	D L H	Tahunan	Maret	-	-	-	-
167.	Fasilitas Lingkungan Hidup	D L H	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
168.	Kondisi Persampahan Menurut Volume, Jenis Peralatan dan Tenaga Kerja	D L H	Tahunan	Maret	-	-	-	-
169.	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/Jagung sesuai Kebutuhan)	DKPP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
170.	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	DKPP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
171.	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	DKPP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
172.	Tersalurkannya Cadangan Pangan pada Daerah Rentan Rawan Pangan	DKPP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
173.	Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	DKPP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
174.	Tersedianya Infrastruktur Pergudangan dan Sarana Pendukung Lainnya untuk Penyimpanan Cadangan Pangan	DKPP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
175.	Tersedianya Peta Ketahanan dan Kerenatanan Pangan	DKPP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
176.	Tersedianya Regulasi Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal	DKPP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
177.	Tertanganinya Kerawanan Pangan	DKPP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
178.	Persentase Fasilitas Penanggulangan Bencana	DKPP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
179.	Persentase lahan pertanian yang dikendalikan/ditanggulangi	DKPP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
180.	Persentase penurunan angka penyakit ternak	DKPP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
181.	Persentase Prasarana yang Digunakan	DKPP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
182.	Prasarana Pertanian yang Digunakan	DKPP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
183.	Produksi Sektor Pertanian	DKPP	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
184.	Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun	DKPP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
185.	Sarana Pertanian yang Diberikan	DKPP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
186.	Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna	DKPP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
187.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna	DKPP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
188.	Jumlah Lahan Pertanian Tanaman Pangan	DKPP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
189.	Jumlah Produksi Tanaman Pangan	DKPP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
190.	Nilai Produksi Tanaman Pangan	DKPP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
191.	Luas Areal Tanaman Hortikultura	DKPP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
192.	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	DKPP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
193.	Nilai Produksi Tanaman Hortikultura	DKPP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
194.	Luas Areal Perkebunan Tanaman Tahunan	DKPP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
195.	Jumlah Produksi Perkebunan Tanaman Tahunan	DKPP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
196.	Nilai Produksi Perkebunan Tanaman Tahunan	DKPP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
197.	Indeks Profesionalitas ASN	BKPSDM	Tahunan	Maret	-	-	-	-
198.	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan Tenaga kesehatan)	BKPSDM	Tahunan	Maret	-	-	-	-
199.	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	BKPSDM	Tahunan	Maret	-	-	-	-
200.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga kesehatan)	BKPSDM	Tahunan	Maret	-	-	-	-
201.	Jumlah Pegawai BKPSDM	BKPSDM	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
202.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan BKPSDM	BKPSDM	Tahunan	Maret	-	-	-	-
203.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Pendidikan Terakhir BKPSDM	BKPSDM	Tahunan	Maret	-	-	-	-
204.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Jenis Kelamin	BKPSDM	Tahunan	Maret	-	-	-	-
205.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jabatan Struktural	BKPSDM	Tahunan	Maret	-	-	-	-
206.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	BKPSDM	Tahunan	Maret	-	-	-	-
207.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Agama	BKPSDM	Tahunan	Maret	-	-	-	-
208.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan	BKPSDM	Tahunan	Maret	-	-	-	-
209.	Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) Berdasarkan Pendidikan	BKPSDM	Tahunan	Maret	-	-	-	-
210.	Jumlah Guru Tidak Tetap (GTT) Berdasarkan Pendidikan	BKPSDM	Tahunan	Maret	-	-	-	-
211.	Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) Medis/Para Medis Berdasarkan Pendidikan	BKPSDM	Tahunan	Maret	-	-	-	-
212.	Penetapan Tarif Angkutan Antar Kota dalam Kabupaten, serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan Kelas Ekonomi	Dishub	Tahunan	Februari	-	-	-	-
213.	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten atau Kota	Dishub	Tahunan	Februari	-	-	-	-
214.	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	Dishub	Tahunan	Februari	-	-	-	-
215.	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Infrastruktur Perhubungan	Dishub	Tahunan	Februari	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
216.	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Disnakertrans	Tahunan	Maret	-	-	-	-
217.	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) Wilayah Kabupaten/Kota	Disnakertrans	Tahunan	Maret	-	-	-	-
218.	Jumlah Lowongan Kerja yang Tersedia di Wilayah Kabupaten/Kota	Disnakertrans	Tahunan	Maret	-	-	-	-
219.	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	Disnakertrans	Tahunan	Maret	-	-	-	-
220.	Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar di Kabupaten/Kota	Disnakertrans	Tahunan	Maret	-	-	-	-
221.	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	Disnakertrans	Tahunan	Maret	-	-	-	-
222.	Jumlah Penganggur yang Dilatih	Disnakertrans	Tahunan	Maret	-	-	-	-
223.	Jumlah Perjanjian Kerja yang Disahkan oleh Dinas Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota	Disnakertrans	Tahunan	Maret	-	-	-	-
224.	Jumlah Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (Satu) Perusahaan	Disnakertrans	Tahunan	Maret	-	-	-	-
225.	Jumlah Perselisihan Kepentingan	Disnakertrans	Tahunan	Maret	-	-	-	-
226.	Lulusan Bersertifikat Kompetensi	Disnakertrans	Tahunan	Maret	-	-	-	-
227.	Persentase Instruktur Bersertifikat Kompetensi	Disnakertrans	Tahunan	Maret	-	-	-	-
228.	Persentase Jumlah Perusahaan yang Berselisih	Disnakertrans	Tahunan	Maret	-	-	-	-
229.	Persentase LPK yang Memiliki Perizinan	Disnakertrans	Tahunan	Maret	-	-	-	-
230.	Persentase LPK yang Terakreditasi	Disnakertrans	Tahunan	Maret	-	-	-	-
231.	Persentase Penyerapan Lulusan	Disnakertrans	Tahunan	Maret	-	-	-	-
232.	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Disnakertrans	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
233.	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Disnakertrans	Tahunan	Maret	-	-	-	-
234.	Persentase Perusahaan yang Sudah Menyusun Struktur Skala Upah	Disnakertrans	Tahunan	Maret	-	-	-	-
235.	Persentase Perusahaan yang Telah Memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Disnakertrans	Tahunan	Maret	-	-	-	-
236.	Persentase Perusahaan yang Telah Terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan	Disnakertrans	Tahunan	Maret	-	-	-	-
237.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Disnakertrans	Tahunan	Maret	-	-	-	-
238.	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Parwisata yang Disertifikasi	Disnakertrans	Tahunan	Maret	-	-	-	-
239.	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Disnakertrans	Tahunan	Maret	-	-	-	-
240.	Rasio Jumlah Instruktur Terhadap Peserta Pelatihan	Disnakertrans	Tahunan	Maret	-	-	-	-
241.	Rasio Penduduk yang Bekerja	Disnakertrans	Tahunan	Maret	-	-	-	-
242.	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Difasilitasi Penetapannya	Disnakertrans	Tahunan	Maret	-	-	-	-
243.	Jumlah Satuan Pemukiman Transmigrasi yang Difasilitasi Pembangunannya	Disnakertrans	Tahunan	Maret	-	-	-	-
244.	Jumlah Satuan Pemukiman yang Dibina	Disnakertrans	Tahunan	Maret	-	-	-	-
245.	Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna	Disnakertrans	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESASAK
246.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Pendidikan terakhir Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna	Disnakertrans	Tahunan	Maret	-	-	-	-
247.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna	Disnakertrans	Tahunan	Maret	-	-	-	-
248.	Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar Menurut Jenis Kelamin	Disnakertrans	Tahunan	Maret	-	-	-	-
249.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	D P K	Tahunan	Februari	-	-	-	-
250.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	D P K	Tahunan	Februari	-	-	-	-
251.	Indeks Penyelenggaraan Kearsipan	D P K	Tahunan	Februari	-	-	-	-
252.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai Bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	D P K	Tahunan	Februari	-	-	-	-
253.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	D P K	Tahunan	Februari	-	-	-	-
254.	Jumlah Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna	D P K	Tahunan	Februari	-	-	-	-
255.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna	D P K	Tahunan	Februari	-	-	-	-
256.	Jumlah Perpustakaan	D P K	Tahunan	Februari	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
257.	Jumlah Fasilitas Perpustakaan	D P K	Tahunan	Februari	-	-	-	-
258.	Jumlah Bimbingan Sosial yang Dilaksanakan Kepada Keluarga dan Masyarakat	Dinsos	Tahunan	Februari	-	-	-	-
259.	Jumlah Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang untuk Masuk dalam Data Terpadu FM dan OTM	Dinsos	Tahunan	Februari	-	-	-	-
260.	Jumlah Kendaraan Roda Empat yang Akses Khusus Layanan Kedaruratan yang Dimiliki	Dinsos	Tahunan	Februari	-	-	-	-
261.	Jumlah Korban Bencana yang Mendapat Makanan	Dinsos	Tahunan	Februari	-	-	-	-
262.	Jumlah Korban Bencana yang Menerima Paket Sandang	Dinsos	Tahunan	Februari	-	-	-	-
263.	Jumlah Layanan Data dan Pengaduaan yang Dimiliki	Dinsos	Tahunan	Februari	-	-	-	-
264.	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Tersedia	Dinsos	Tahunan	Februari	-	-	-	-
265.	Jumlah Pekerja Sosial Profesional dan/atau TKS dan/atau Relawan Sosial yang Disediakan	Dinsos	Tahunan	Februari	-	-	-	-
266.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Difasilitasi untuk Mendapatkan Dokumen Kependudukan	Dinsos	Tahunan	Februari	-	-	-	-
267.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Dijangkau	Dinsos	Tahunan	Februari	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESASAK
268.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Direunifikasi dengan Keluarga	Dinsos	Tahunan	Februari	-	-	-	-
269.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Dirujuk	Dinsos	Tahunan	Februari	-	-	-	-
270.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Memanfaatkan Alat Bantu	Dinsos	Tahunan	Februari	-	-	-	-
271.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Mendapatkan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Dinsos	Tahunan	Februari	-	-	-	-
272.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental dan Sosial sesuai Standar di Keluarga, Masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter	Dinsos	Tahunan	Februari	-	-	-	-
273.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Mendapatkan Layanan Penelusuran Keluarga	Dinsos	Tahunan	Februari	-	-	-	-
274.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Menerima Paket Perumahan sesuai Standar Gizi	Dinsos	Tahunan	Februari	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
275.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Menerima Paket Sandang didalam panti	Dinsos	Tahunan	Februari	-	-	-	-
276.	Jumlah Singgah/Shelter/Tempat Tinggal Sementara yang Dimiliki sesuai Standar	Dinsos	Tahunan	Februari	-	-	-	-
277.	Jumlah Tenaga Kesehatan yang Disediakan di Rumah Singgah	Dinsos	Tahunan	Februari	-	-	-	-
278.	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang Dibentuk	Dinsos	Tahunan	Februari	-	-	-	-
279.	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Dinsos	Tahunan	Februari	-	-	-	-
280.	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Dinsos	Tahunan	Februari	-	-	-	-
281.	Persentase Pemberdayaan Sosial	Dinsos	Tahunan	Februari	-	-	-	-
282.	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar PPKS	Dinsos	Tahunan	Februari	-	-	-	-
283.	Persentase Penyandang Disabilitas yang Miskin dan Rentan yang Terpenuhi Hak Dasarnya dan Inklusivitas	Dinsos	Tahunan	Februari	-	-	1.3.1.(c)	-
284.	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS	Dinsos	Tahunan	Februari	-	-	-	-
285.	Persentase warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Dinsos	Tahunan	Februari	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESASAK
286.	Persentase warga negara lanjut usia terlanjar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Dinsos	Tahunan	Februari	-	-	-	-
287.	Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Dinsos	Tahunan	Februari	-	-	-	-
288.	Persentase warga negara korban bencana Kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Dinsos	Tahunan	Februari	-	-	-	-
289.	Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Natuna	Dinsos	Tahunan	Februari	-	-	-	-
290.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Pendidikan Terakhir Dinas Sosial Kabupaten Natuna	Dinsos	Tahunan	Februari	-	-	-	-
291.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan Dinas Sosial Kabupaten Natuna	Dinsos	Tahunan	Februari	-	-	-	-
292.	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Dinsos	Tahunan	Februari	-	-	-	-
293.	Data Keluarga Penerima Bantuan Pangan Non Tunai	Dinsos	Tahunan	Februari	-	-	-	-
294.	Data Penyandang Cacat	Dinsos	Tahunan	Februari	-	-	-	-
295.	Kegiatan Pameran Penanaman Modal	DPMPTSP	Tahunan	Februari	-	-	-	-
296.	Kenaikan Penurunan Nilai Realisasi Investasi (PMDN)	DPMPTSP	Tahunan	Februari	-	-	-	-
297.	Konsultasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	DPMPTSP	Tahunan	Februari	-	-	-	-
298.	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	DPMPTSP	Tahunan	Februari	-	-	-	-
299.	Laporan Realisasi Penanaman Modal	DPMPTSP	Tahunan	Februari	-	-	-	-
300.	Pembinaan Aparatur Penanaman Modal Tingkat Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Tahunan	Februari	-	-	-	-
301.	Pembinaan Penanaman Modal PMA dan PMDN	DPMPTSP	Tahunan	Februari	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
302.	Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	DPMPTSP	Tahunan	Februari	-	-	-	-
303.	PERDA Mengenai Pemberian Fasilitas/Intensif Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Tahunan	Februari	-	-	-	-
304.	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Tahunan	Februari	-	-	-	-
305.	Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Insentif Penanaman Modal	DPMPTSP	Tahunan	Februari	-	-	-	-
306.	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Tahunan	Februari	-	-	-	-
307.	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	DPMPTSP	Tahunan	Februari	-	-	-	-
308.	Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna	DPMPTSP	Tahunan	Februari	-	-	-	-
309.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna	DPMPTSP	Tahunan	Februari	-	-	-	-
310.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna	DPMPTSP	Tahunan	Februari	-	-	-	-
311.	Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan (Sicantik)	DPMPTSP	Tahunan	Februari	-	-	-	-
312.	Proses Perizinan Menggunakan Sistem OSS RBA	DPMPTSP	Tahunan	Februari	-	-	-	-
313.	Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	DPMPTSP	Tahunan	Februari	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESASAK
314.	Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	DPMPSTP	Tahunan	Februari	-	-	-	-
315.	Jumlah Entitas Pengelolaan Destinasi	Dispar	Tahunan	Maret	-	-	-	-
316.	Jumlah Event Luar Negeri yang Diikuti Provinsi	Dispar	Tahunan	Maret	-	-	-	-
317.	Jumlah Industri Pariwisata Daerah yang Berpartisipasi pada Event Promosi Pariwisata di Dalam Negeri	Dispar	Tahunan	Maret	-	-	-	-
318.	Jumlah Kelengkapan Infrastruktur Dasar, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata	Dispar	Tahunan	Maret	-	-	-	-
319.	Jumlah Kunjungan Wisata	Dispar	Tahunan	Maret	-	-	8.9.1.(b)	-
320.	Jumlah Lokasi yang Memperoleh Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemitraan Usaha Masyarakat	Dispar	Tahunan	Maret	-	-	-	-
321.	Jumlah Promosi Event Daerah yang Terlaksana di Dalam Negeri	Dispar	Tahunan	Maret	-	-	-	-
322.	Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata per Sub Jenis Usaha di Kabupaten/Kota	Dispar	Tahunan	Maret	-	-	-	-
323.	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Dispar	Tahunan	Maret	-	-	8.9.1.(a)	-
324.	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	Dispar	Tahunan	Maret	-	-	-	-
325.	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku	Dispar	Tahunan	Maret	-	-	-	-
326.	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten/Kota	Dispar	Tahunan	Maret	-	-	-	-
327.	Persentase Produk Wisata yang Dipasarkan	Dispar	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
328.	Persentase SDM Peserta Pembekalan Sektor Kepariwisata	Dispar	Tahunan	Maret	-	-	-	-
329.	Rata-rata Lama Tinggal Wisata	Dispar	Tahunan	Maret	-	-	-	-
330.	Tingkat Hunian Akomodasi	Dispar	Tahunan	Maret	-	-	-	-
331.	Persentase Kawasan Pariwisata yang Dikembangkan	Dispar	Tahunan	Maret	-	-	-	-
332.	Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata	Dispar	Tahunan	Maret	-	-	-	-
333.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir Dinas Pariwisata	Dispar	Tahunan	Maret	-	-	-	-
334.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan Dinas Pariwisata	Dispar	Tahunan	Maret	-	-	-	-
335.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Dispar	Tahunan	Maret	-	-	-	-
336.	Jumlah Jasa Usaha	Dispar	Tahunan	Maret	-	-	-	-
337.	Jumlah Objek Wisata Menurut Jenisnya	Dispar	Tahunan	Maret	-	-	-	-
338.	Jumlah Pengunjung Wisata Menurut Jenisnya	Dispar	Tahunan	Maret	-	-	-	-
339.	Jumlah Patroli Siaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Sosialisasi per Hari	Satpol PP	Tahunan	Februari	-	-	-	-
340.	Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum dalam Kabupaten/Kota yang Ditangani	Satpol PP	Tahunan	Februari	-	-	-	-
341.	Jumlah Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satpol PP	Tahunan	Februari	-	-	-	-
342.	Jumlah Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Satpol PP	Tahunan	Februari	-	-	-	-
343.	Jumlah Polisi Pamong Praja yang Memiliki Kualitas sebagai PPNS	Satpol PP	Tahunan	Februari	-	-	-	-
344.	Jumlah Sarana Prasarana Minimal Satpol PP	Satpol PP	Tahunan	Februari	-	-	-	-
345.	Jumlah Satlinmas yang Terlatih dan Dikukuhkan	Satpol PP	Tahunan	Februari	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
346.	Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan	Satpol PP	Tahunan	Februari	-	-	-	-
347.	Persentase Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Ikut Pelatihan	Satpol PP	Tahunan	Februari	-	-	-	-
348.	Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP	Satpol PP	Tahunan	Februari	-	-	-	-
349.	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakan	Satpol PP	Tahunan	Februari	-	-	-	-
350.	Persentase Warga Negara yang Ikut Pelatihan	Satpol PP	Tahunan	Februari	-	-	-	-
351.	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	Satpol PP	Tahunan	Februari	-	-	-	-
352.	Tersedianya Aparatur Selama 24 (Jam) yang Dilaksanakan Secara Bergantian (Shift) di Kantor Kecamatan	Satpol PP	Tahunan	Februari	-	-	-	-
353.	Tersedianya Sarana Prasarana Minimal	Satpol PP	Tahunan	Februari	-	-	-	-
354.	Tersedianya SOP dalam Penegakan Perda dan Perkada serta Penanganan Gangguan Trantibum	Satpol PP	Tahunan	Februari	-	-	-	-
355.	Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna	Satpol PP	Tahunan	Februari	-	-	-	-
356.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna	Satpol PP	Tahunan	Februari	-	-	-	-
357.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna	Satpol PP	Tahunan	Februari	-	-	-	-
358.	Sarana Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna	Satpol PP	Tahunan	Februari	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN / RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESASAK
359.	Jumlah Polisi Pamong Praja dan Petugas Perlindungan Masyarakat	Satpol PP	Tahunan	Februari	-	-	-	-
360.	Penegakan Petugas Satpol PP	Satpol PP	Tahunan	Februari	-	-	-	-
361.	Dokumen Strategi Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Tingkat Nasional dan Daerah	Damkar	Tahunan	Maret	-	-	-	-
362.	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam Sebagaimana Dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	Damkar	Tahunan	Maret	-	-	-	-
363.	Jumlah dan Jenis Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non Kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota	Damkar	Tahunan	Maret	-	-	-	-
364.	Jumlah dan Jenis Sarana Prasarana Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi	Damkar	Tahunan	Maret	-	-	-	-
365.	Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran	Damkar	Tahunan	Maret	-	-	-	-
366.	Jumlah Relawan Kebakaran Dibawah Binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran	Damkar	Tahunan	Maret	-	-	-	-
367.	Jumlah Sarana Pemadam Kebakaran yang Diadakan	Damkar	Tahunan	Maret	-	-	-	-
368.	Persentase Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Penanganan Kebakaran	Damkar	Tahunan	Maret	-	-	-	-
369.	Persentase Kecepatan Respon Kurang dari 24 Jam untuk Setiap Status KLB	Damkar	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
370.	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Damkar	Tahunan	Maret	-	-	-	-
371.	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Damkar	Tahunan	Maret	-	-	-	-
372.	Pos Damkar yang Dilengkapi dengan Sarana/Prasarana Damkar, Sarana Prasarana Penyelamatan dan Evakuasi di Setiap Kelurahan/Desa	Damkar	Tahunan	Maret	-	-	-	-
373.	Tersedianya Pos Sektor Damkar yang Dilengkapi Sarana Prasarana Damkar Sarana Prasarana Penyelamatan di Kantor Kecamatan	Damkar	Tahunan	Maret	-	-	-	-
374.	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Damkar	Tahunan	Maret	-	-	-	-
375.	Jumlah Daerah Bencana Alam/Bencana Sosial yang Mendapat Pendidikan Layanan Khusus (SMAB = Sekolah/Madrasah Aman Bencana)	BPBD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
376.	Persentase Jumlah Korban Berhasil Dicari, Ditolong dan Dievakuasi Terhadap Kejadian Bencana	BPBD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
377.	Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana sesuai Jenis Ancaman Bencana	BPBD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
378.	Persentase Jumlah Petugas yang Aktif dalam Penanganan Darurat Bencana	BPBD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
379.	Persentase Kecepatan Respon Kurang dari 24 Jam untuk Setiap Status Darurat Bencana	BPBD	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESASAK
380.	Persentase Penyelesaian Dokumen KRB sampai dengan Dinyatakan Sah/Legal	BPBD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
381.	Persentase Penyelesaian Dokumen Renkon sampai Dinyatakan Sah/Legal	BPBD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
382.	Persentase Penyelesaian Dokumen RPB sampai Dinyatakan Sah/Legal	BPBD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
383.	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Bencana	BPBD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
384.	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	BPBD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
385.	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	BPBD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
386.	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	BPBD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
387.	Persentase Warga Negara yang Mendapat Layanan PUSDALOPS Penanggulangan Bencana dan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana	BPBD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
388.	Persentase Warga Negara yang Mendapat Peralatan Perlindungan	BPBD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
389.	Jumlah Kader Perempuan Tingkat Kabupaten/Kota yang sudah Dilatih	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
390.	Jumlah Kebijakan/Program Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO pada Perangkat Daerah yang sudah Dievaluasi	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
391.	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang Mendapat Pelatihan	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAS
392.	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang Mendapatkan Bantuan Keuangan, Fasilitas oleh Pemerintah Kabupaten/Kota (APBD kabupaten/Kota)	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
393.	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang telah Memiliki Standar Pelayanan Minimal	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
394.	Jumlah Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapat Pelatihan	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
395.	Jumlah Lembaga Pemerintah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang telah Dilatih PUG	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
396.	Jumlah Media Massa (Cetak dan Elektronik) yang Bekerja Sama dengan Kabupaten/Kota (Dinas PPPA) untuk Melakukan KIE Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
397.	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Bergerak dalam Bidang Perempuan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pelatihan	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
398.	Jumlah Program PUG Ada Perangkat Daerah yang Sudah Dievaluasi Melalui Analisis Gender di Tingkat Kabupaten/Kota	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
399.	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
400.	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
401.	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
402.	Persentase Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
403.	Persentase Keterwakilan Perempuan sebagai Pengambilan Keputusan di Lembaga Eksekutif (Eselon I dan II)	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
404.	Persentase Korban Kekerasan Anak yang Terlayani	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
405.	Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang Terlayani	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
406.	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
407.	Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di Parlemen Tingkat Pusat, Parlemen Daerah dan Pemerintah Daerah	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	5.5.1	-
408.	Proporsi Perempuan Dewasa dan Anak Perempuan (Umur 15-64 Tahun) Mengalami Kekerasan Seksual oleh Orang Lain selain Pasangan dalam 12 Bulan Terakhir	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
409.	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
410.	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
411.	Angka Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Cara Modern	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESASAK
412.	Jumlah Stakeholders/Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja (Termasuk Organisasi Kemasyarakatan) yang Berperan serta Aktif dalam Pengelolaan Program KKBPK	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
413.	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) Seluruh Wanita Umur 25-49 Tahun	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
414.	Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang Efektif	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
415.	Pengetahuan dan Pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang Metode Kontrasepsi Modern	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
416.	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang Siap Melayani KB MKJP	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
417.	Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
418.	Persentase Kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan Kesertaan Rendah	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
419.	Persentase Kesertaan KB Keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
420.	Persentase Masyarakat yang Terpapar Isi Pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
421.	Persentase Pelayanan KB Pasca Persalinan	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
422.	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
423.	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
424.	Tersedianya Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang diPerdakan	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
425.	TFR (Angka Kelahiran Total)	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
426.	Unmeet Need Pelayanan Kesehatan	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
427.	Indeks Pembangunan Gender	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
428.	Jumlah Pegawai DP3AP2KB	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
429.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir DP3AP2KB	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
430.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan DP3AP2KB	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
431.	Jumlah Pekerja Perempuan di Instansi Pemerintah dan Swasta	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
432.	Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
433.	Jumlah Pasangan Usia Subur	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
434.	Jumlah Perkembangan Pengguna Alat Kontrasepsi	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
435.	Jumlah Kejadian Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Anak di Bawah Umur Melakukan Tindakan Kriminal	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
436.	Data Kelompok Tri Bina dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
437.	Data Pengaduan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Natuna	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
438.	Laju Pertumbuhan PDRB Industri Manufaktur	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
439.	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
440.	Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi wirausaha	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
441.	Persentase Fasilitas Penerbitan Ijin Usaha Simpan Pinjam yang Diterbitkan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
442.	Persentase Fasilitas Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
443.	Persentase Fasilitas Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
444.	Persentase Jumlah Anggota Koperasi yang Telah Mengikuti Pelatihan Perkoperasian untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
445.	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Bermitra	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
446.	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pemasaran	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
447.	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitas Standarisasi dan Sertifikasi Produk Usaha	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
448.	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diberikan Pendampingan Melalui Lembaga Pendampingan	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESASAK
449.	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diinput kedalam Sistem Online Data System (ODS)	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
450.	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Kemitraan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
451.	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pembiayaan	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
452.	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pembiayaan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
453.	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pendampingan Kelembagaan dan Usaha untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
454.	Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
455.	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang Dilakukan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
456.	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Mikro	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
457.	Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang Dinilai Kesehatannya untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
458.	Persentase yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pemasaran untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
459.	Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Mikro	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
460.	Rasio Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
461.	Jumlah Pupuk dan Pestisida yang Tersalurkan	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
462.	Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Ditera/Tera Ulang dalam Tahun Berjalan	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
463.	Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
464.	Persentase Gudang yang Tidak Mempunyai TDG	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
465.	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
466.	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
467.	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
468.	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
469.	Persentase Pemeriksaan Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
470.	Persentase Penerbitan SKA yang Tepat Waktu	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
471.	Persentase Penerbitan TDG	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
472.	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
473.	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah Kerjanya	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
474.	Persentase Perizinan yang Diterbitkan sesuai dengan Ketentuan untuk Izin Pusat Perbelanjaan	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
475.	Persentase Perizinan yang Diterbitkan sesuai dengan Ketentuan untuk Izin Toko Swalayan	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
476.	Persentase Produk yang di Pasarkan Melalui Pasar Digital	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
477.	Persentase Data Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota yang Masuk dalam SII Nas Terhadap Total Populasi Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
478.	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
479.	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
480.	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
481.	Persentase Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Kecil dan Menengah yang Diterbitkan	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
482.	Persentase Jumlah Izin yang Diterbitkan Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah yang Diterbitkan	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
483.	Persentase Jumlah Penetapan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
484.	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan dalam RPJP	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
485.	Persentase Pertambahan Industri Rumah Tangga dan Olahan	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
486.	Persentase Tereleaksainya Dokumen RIPIK sampai dengan Ditetapkannya Menjadi PERDA	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
487.	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di kab/kota	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
488.	Tersedianya Informasi Industri secara Lengkap dan Terkini	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
489.	Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
490.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Pendidikan Terakhir Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
491.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
492.	Jumlah Koperasi	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
493.	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
494.	Jumlah Desa yang Melakukan Kerjasama Antar Desa	DPMD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
495.	Persentase Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang	DPMD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
496.	Jumlah Desa Mandiri	DPMD	Tahunan	Maret	-	-	10.1.1.1.(d)	-
497.	Jumlah Desa yang Tereleaksifikasi dalam Kerjasama Antar Desa	DPMD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
498.	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Desa yang Tereleaksifikasi dalam Peningkatan Kapasitas dan Diberdayakan	DPMD	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
499.	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diberikan Diklat	DPMD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
500.	Jumlah Peningkatan Desa yang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adatnya Melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif dan Pemberdayaan	DPMD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
501.	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	DPMD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
502.	Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna	DPMD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
503.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna	DPMD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
504.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna	DPMD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
505.	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	DPMD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
506.	Jumlah Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	DPMD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
507.	Data Jumlah Aparat Pemerintah Desa	DPMD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
508.	Data Pelayanan Administrasi Desa	DPMD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
509.	Data Jumlah dan Kondisi Kantor Pemerintah Desa/Kelurahan	DPMD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
510.	Data Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	DPMD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
511.	Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total dalam APBD	BPKPD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
512.	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD dalam APBD	BPKPD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
513.	Indeks Pengelolaan Aset	BPKPD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
514.	Indeks Pengelolaan Keuangan	BPKPD	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
515.	Manajemen Aset	BPKPD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
516.	Opini Laporan Keuangan	BPKPD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
517.	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	BPKPD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
518.	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	BPKPD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
519.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)	BPKPD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
520.	Rasio PAD	BPKPD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
521.	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB	BPKPD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
522.	Jumlah Pegawai BPKPD	BPKPD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
523.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan BPKPD	BPKPD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
524.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Pendidikan Terakhir BPKPD	BPKPD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
525.	Data Wajib Pajak PBB-P2	BPKPD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
526.	Realisasi Pendapatan Jenis Pajak Daerah	BPKPD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
527.	Realisasi Pendapatan Jenis Retribusi Daerah	BPKPD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
528.	Realisasi Belanja Daerah	BPKPD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
529.	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	BPKPD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
530.	Maturitas SPIP	Inspektorat	Tahunan	Maret	-	-	-	-
531.	Peningkatan Kapabilitas APIP	Inspektorat	Tahunan	Maret	-	-	-	-
532.	Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna	Inspektorat	Tahunan	Maret	-	-	-	-
533.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna	Inspektorat	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
534.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna	Inspektorat	Tahunan	Maret	-	-	-	-
535.	Data Jumlah Pemeriksaan	Inspektorat	Tahunan	Maret	-	-	-	-
536.	Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)	Inspektorat	Tahunan	Maret	-	-	-	-
537.	Jumlah OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	Disdukcapil	Tahunan	Maret	-	-	-	-
538.	Kepemilikan akta kelahiran	Disdukcapil	Tahunan	Maret	-	-	1.4.1.(j)	-
539.	Penerbitan Akta Kematian	Disdukcapil	Tahunan	Maret	-	-	-	-
540.	Penerbitan Akta Perceraian	Disdukcapil	Tahunan	Maret	-	-	-	-
541.	Penerbitan Akta Perkawinan	Disdukcapil	Tahunan	Maret	-	-	-	-
542.	Penyajian Data Kependudukan	Disdukcapil	Tahunan	Maret	-	-	-	-
543.	Perekaman KTP Elektronik	Disdukcapil	Tahunan	Maret	-	-	-	-
544.	Persentase Anak Usia 1-17 Tahun Kurang 1 (Satu) hari yang Memiliki KIA Kepemilikan Akta Kelahiran	Disdukcapil	Tahunan	Maret	-	-	-	-
545.	Jumlah Pegawai Disdukcapil	Disdukcapil	Tahunan	Maret	-	-	-	-
546.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan Disdukcapil	Disdukcapil	Tahunan	Maret	-	-	-	-
547.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Pendidikan Terakhir Disdukcapil	Disdukcapil	Tahunan	Maret	-	-	-	-
548.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan	Disdukcapil	Tahunan	Maret	-	-	-	-
549.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Desa/Kelurahan	Disdukcapil	Tahunan	Maret	-	-	-	-
550.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur 5 Tahunan	Disdukcapil	Tahunan	Maret	-	-	-	-
551.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur 5 Tahunan dan Kecamatan	Disdukcapil	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESASAK
552.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	Disdukcapil	Tahunan	Maret	-	-	-	-
553.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan dan Kecamatan	Disdukcapil	Tahunan	Maret	-	-	-	-
554.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	Disdukcapil	Tahunan	Maret	-	-	-	-
555.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama dan Kecamatan	Disdukcapil	Tahunan	Maret	-	-	-	-
556.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan	Disdukcapil	Tahunan	Maret	-	-	-	-
557.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan dan Kecamatan	Disdukcapil	Tahunan	Maret	-	-	-	-
558.	Jumlah Penduduk Penyandang Cacat/Disabilitas	Disdukcapil	Tahunan	Maret	-	-	-	-
559.	Jumlah Penduduk Penyandang Cacat/Disabilitas dan Kecamatan	Disdukcapil	Tahunan	Maret	-	-	-	-
560.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepala Keluarga dan Kecamatan	Disdukcapil	Tahunan	Maret	-	-	-	-
561.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepala Keluarga Desa/Kelurahan	Disdukcapil	Tahunan	Maret	-	-	-	-
562.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan KIA	Disdukcapil	Tahunan	Maret	-	-	-	-
563.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan KIA dan Kecamatan	Disdukcapil	Tahunan	Maret	-	-	-	-
564.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Akte Kelahiran dan Kecamatan	Disdukcapil	Tahunan	Maret	-	-	-	-
565.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan KTP dan Kecamatan	Disdukcapil	Tahunan	Maret	-	-	-	-
566.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	Disdukcapil	Tahunan	Maret	-	-	-	-
567.	Persentase ASN Pengelola TIK yang Tersertifikasi Kompetensi di Bawah Pengelolaan Dinas Kominfo	Diskominfo	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
568.	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang Terupdate	Diskominfo	Tahunan	Maret	-	-	-	-
569.	Persentase Komunitas Masyarakat/Mitra Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Menyebarkan Informasi dan Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Tahunan	Maret	-	-	-	-
570.	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Diskominfo	Tahunan	Maret	-	-	-	-
571.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	Diskominfo	Tahunan	Maret	-	-	-	-
572.	Persentase Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Diskominfo	Tahunan	Maret	-	-	-	-
573.	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Portal dan Situs Web yang sesuai Standar	Diskominfo	Tahunan	Maret	-	-	-	-
574.	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Akses Internet yang Berkualitas yang Disediakan Dinas Kominfo	Diskominfo	Tahunan	Maret	-	-	-	-
575.	Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Layanan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus yang Ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	Diskominfo	Tahunan	Maret	-	-	-	-
576.	Persentase Perangkat Daerah yang Terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau Menggunakan Akses Internet yang Diamankan yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	Diskominfo	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
577.	Persentase Sistem Elektronik yang Terdaftar sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Diskominfo	Tahunan	Maret	-	-	-	-
578.	Tersedianya Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah Terkait Implementasi E-Government	Diskominfo	Tahunan	Maret	-	-	-	-
579.	Tersedianya Sistem Elektronik Komunikasi Intra Pemerintah yang Disediakan Dinas Kominfo (Berdasarkan Suara, Video, Teks, Data dan Sinyal Lainnya) dengan Memanfaatkan Jaringan Intra Pemerintah	Diskominfo	Tahunan	Maret	-	-	-	-
580.	Jumlah Survey Statistik Sektoral yang Mendapat Rekomendasi dari BPS	Diskominfo	Tahunan	Maret	-	-	-	-
581.	Tersedianya Buku Profil Daerah	Diskominfo	Tahunan	Maret	-	-	-	-
582.	Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna	Diskominfo	Tahunan	Maret	-	-	-	-
583.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna	Diskominfo	Tahunan	Maret	-	-	-	-
584.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna	Diskominfo	Tahunan	Maret	-	-	-	-
585.	Jumlah Tower dan Kualitas Layanan Operator Seluler (Opsel) Menurut Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Diskominfo	Tahunan	Maret	-	-	-	-
586.	Banyaknya Tower/Menara Bts/Opsel Menurut Kecamatan	Diskominfo	Tahunan	Maret	-	-	-	-
587.	Data Kualitas Layanan Opsel/Bts Menurut Kecamatan	Diskominfo	Tahunan	Maret	-	-	-	-
588.	Jumlah Penyelenggaraan Event/Prestasi Tingkat Daerah	Dispora	Tahunan	Maret	-	-	-	-
589.	Peningkatan Prestasi Olahraga	Dispora	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
590.	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Dispora	Tahunan	Maret	-	-	-	-
591.	Jumlah Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga	Dispora	Tahunan	Maret	-	-	-	-
592.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Pendidikan Terakhir Dispora	Dispora	Tahunan	Maret	-	-	-	-
593.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan Dispora	Dispora	Tahunan	Maret	-	-	-	-
594.	Jumlah Lapangan/Gedung Olahraga	Dispora	Tahunan	Maret	-	-	-	-
595.	Jumlah Benih Budidaya Air Tawar dan Air Payau yang di Produksi	Diskan	Tahunan	Maret	-	-	-	-
596.	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Diterbitkan	Diskan	Tahunan	Maret	-	-	-	-
597.	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Memperoleh Kegiatan Pemberdaya (Pendidikan dan Pelatihan/Penyuluhan dan Pendampingan/Kemitraan Usaha/Kemudahan Akses Iptek dan Informasi/dan Penguatan Kelembagaan)	Diskan	Tahunan	Maret	-	-	-	-
598.	Jumlah Rumah Tangga Nelayan yang Melakukan Diversifikasi Usaha (RTP)	Diskan	Tahunan	Maret	-	-	-	-
599.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (SumberData: One Data KKP)	Diskan	Tahunan	Maret	-	-	-	-
600.	Produksi Sektor Perikanan	Diskan	Tahunan	Maret	-	-	-	-
601.	Jumlah Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Natuna	Diskan	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
602.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir Dinas Perikanan Kabupaten Natuna	Diskan	Tahunan	Maret	-	-	-	-
603.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna	Diskan	Tahunan	Maret	-	-	-	-
604.	Data Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan	Diskan	Tahunan	Maret	-	-	-	-
605.	Data Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan	Diskan	Tahunan	Maret	-	-	-	-
606.	Data Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan	Diskan	Tahunan	Maret	-	-	-	-
607.	Data Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan	Diskan	Tahunan	Maret	-	-	-	-
608.	Data Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar Menurut Kecamatan	Diskan	Tahunan	Maret	-	-	-	-
609.	Data Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan	Diskan	Tahunan	Maret	-	-	-	-
610.	Data Jumlah Armada Tangkap Menurut Jenis Kapal	Diskan	Tahunan	Maret	-	-	-	-
611.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Setda	Tahunan	Maret	-	-	-	-
612.	Indeks Pengadaan Barang/Jasa	Setda	Tahunan	Maret	-	-	-	-
613.	Nilai LAKIP	Setda	Tahunan	Maret	-	-	-	-
614.	Nilai LPPD	Setda	Tahunan	Maret	-	-	-	-
615.	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif	Setda	Tahunan	Maret	-	-	-	-
616.	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	Setda	Tahunan	Maret	-	-	-	-
617.	Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan	Setda	Tahunan	Maret	-	-	-	-
618.	Indek Kualitas Perencanaan	BP3D	Tahunan	Maret	-	-	-	-
619.	Persentase Indikator SDGs terpilih yang relevan dengan target	BP3D	Tahunan	Maret	-	-	17.18.1.(d)	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
620.	Persentase Rekomendasi yang Diakomodir	BPPD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
621.	Jumlah LSM, Ormas dan OKP	Bakesbangpol	Tahunan	Maret	-	-	-	-
622.	Jumlah peserta sosialisasi wasbang	Bakesbangpol	Tahunan	Maret	-	-	-	-
623.	Jumlah Sosialisasi/Rapat/Monitoring	Bakesbangpol	Tahunan	Maret	-	-	-	-
624.	Pembinaan Partai Politik	Bakesbangpol	Tahunan	Maret	-	-	-	-
625.	Tercapainya Sinergitas Dinas/Instansi dalam Menangani Konflik Sosial	Bakesbangpol	Tahunan	Maret	-	-	-	-
626.	Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bakesbangpol	Tahunan	Maret	-	-	-	-
627.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bakesbangpol	Tahunan	Maret	-	-	-	-
628.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Pendidikan Terakhir Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bakesbangpol	Tahunan	Maret	-	-	-	-
629.	Data Partai Politik, Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat dan Layanan	Bakesbangpol	Tahunan	Maret	-	-	-	-
630.	Jumlah Pegawai Sekretariat Dewan	Setwan	Tahunan	Maret	-	-	-	-
631.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan Sekretariat Dewan	Setwan	Tahunan	Maret	-	-	-	-
632.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Pendidikan Terakhir Sekretariat Dewan	Setwan	Tahunan	Maret	-	-	-	-
633.	Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin	Setwan	Tahunan	Maret	-	-	-	-
634.	Jumlah Anggota DPRD Menurut Struktur dan Jenis Kelamin	Setwan	Tahunan	Maret	-	-	-	-
635.	Banyaknya Kegiatan/Rapat DPRD	Setwan	Tahunan	Maret	-	-	-	-
636.	Banyaknya Keputusan DPRD Menurut Jenisnya	Setwan	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN / RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
637.	Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan di RSUD Natuna	RSUD	Tahunan	Februari	Kesehatan	-	-	-
638.	10 Penyakit Terbesar di Instalasi Rawat Jalan RSUD Natuna	RSUD	Tahunan	Februari	Kesehatan	-	-	-
639.	Status Kunjungan Pasien IGD RSUD Natuna	RSUD	Tahunan	Februari	Kesehatan	-	-	-
640.	10 Penyakit Terbesar di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Natuna	RSUD	Tahunan	Februari	Kesehatan	-	-	-
641.	Fasilitas Tempat Tidur RSUD Natuna	RSUD	Tahunan	Februari	Kesehatan	-	-	-
642.	10 Penyakit Terbesar di Instalasi Rawat Inap RSUD Natuna	RSUD	Tahunan	Februari	Kesehatan	-	-	-
643.	Pelayanan Kebidanan RSUD Natuna	RSUD	Tahunan	Februari	Kesehatan	-	-	-
644.	Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan di RSUD Natuna	RSUD	Tahunan	Februari	Kesehatan	-	-	-
645.	10 Penyakit Terbesar di Instalasi ICU RSUD Natuna	RSUD	Tahunan	Februari	Kesehatan	-	-	-
646.	Jumlah Tenaga Medis & Non Paramedis RSUD Natuna	RSUD	Tahunan	Februari	Kesehatan	-	-	-

